

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk demokrasi dalam suatu negara adalah diselenggarakannya pemilihan umum. Melalui sistem pemilihan umum ini, rakyat mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihannya, baik itu dalam pemilihan umum presiden maupun pemilu legislatif yang nantinya akan memimpin dan menempati lembaga-lembaga perwakilan suatu Negara.

Dalam ilmu politik, pemilihan umum adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif hingga pemerintahan daerah. Dalam Pemilu, para pemilih disebut konstituen. Para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye kepada konstituen. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan sampai menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan kemudian disosialisasikan kepada para pemilih. Dari situ pemilihan umum merupakan langkah awal terbentuknya suatu proses demokratisasi suatu Negara.

Selayaknya sebuah negara yang memiliki bentuk republik yang demokratis, Perancis pada saat ini memisahkan seperangkat kekuasaannya menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di samping itu, adanya partai-partai politik meningkatkan tensi politik dan turut berpengaruh dalam dinamika pemerintahan negara tersebut. Interaksi antar berbagai macam unsur politik tersebut menghasilkan konstelasi politik yang menarik dimana masing-masing perangkat memiliki peran dan signifikansi masing-masing dalam politik lokal maupun eksternal (Encyclopedia Britannica, 2016).

Terdapat beberapa jenis sistem dalam pemilihan umum. Di Perancis, sistem pemilihan umum yang digunakan adalah *The Two Round System*. Sistem ini ialah sistem pemilihan umum yang dijalankan sebanyak dua putaran untuk menentukan pemenang dari pemilihan umum tersebut.

Seorang kandidat sebenarnya dapat langsung terpilih sebagai presiden di putaran pertama apabila mampu memperoleh suara lima puluh persen plus satu, namun hal itu tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilihan umum Perancis. Hal ini dikarenakan jumlah kandidat yang ikut serta dalam putaran pertama sangat banyak sehingga kemungkinan untuk mendapatkan suara mutlak sangat kecil. Satu-satunya yang pernah mendekati angka tersebut adalah Charles de Gaulle yang memenangkan 44% suara pada pemilihan umum tahun 1965 (Diffley, How the French presidential election works, 2012).

Pemilu Presiden Perancis pada tahun 2017 ini adalah Pemilu terpenting sejak 2002. Kedua pilpres itu merupakan pertarungan antara kandidat terburuk dan kandidat terbaik dari yang terburuk. Pada pemilu 2002, pilihannya antara petahana Jacques Chirac dan Jean-Marie Le Pen, ayah dari Marine Le Pen, pendiri partai Front National yang dikenal rasial. Pertarungan berikutnya, antara Emmanuel Macron dan Le Pen junior.

Siapa pun yang terpilih akan menentukan nasib Perancis dalam Uni Eropa yang sedang dihantam krisis legitimasi pasca-referendum Brexit. Isu internasional terkait lainnya adalah arus pengungsi, nasib pekerja migran, dan terorisme. Untuk yang terakhir, gelombang terorisme yang melanda Perancis sepanjang tahun 2015-2016 telah mendorong pemerintah memberlakukan Darurat Sipil (*State of Emergency*), yang pada Desember 2016 diperpanjang hingga 2017.

Situasi di dalam negeri tak cerah. Sektor perburuhan misalnya. Di bawah pemerintahan Francois Hollande dari Partai Sosialis, angka pengangguran meningkat dari 9% ke 10,6%, sementara 25% pemuda Perancis menganggur. Perdebatan soal 35 jam kerja per minggu juga menjadi satu topik utama dalam debat dan kampanye para kandidat. Beberapa kandidat ingin mempertahankannya, sebagian ingin mengurangi, dan yang lain ingin menambah.

Antara Maret – Mei 2016, Perancis diguncang serangkaian aksi protes bertajuk *Nuit Debout* sebagai respons atas rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Perburuhan Baru (RUU El-Khoumri) yang dianggap melonggarkan regulasi perburuhan demi menguntungkan pengusaha. Misalnya, perusahaan lebih leluasa untuk memecat pekerja, mengurangi upah lembur, serta memperpanjang jam kerja. Aksi protes pada akhir Maret itu disusul lagi oleh aksi pemogokan selama seminggu pada bulan Mei, yang dikerahkan para pekerja penyulingan minyak, penerbangan sipil, kereta api dan buruh bangunan.

Krisis perumahan belakangan jadi permasalahan selanjutnya. Di kota-kota besar, harga properti dan uang sewa hunian meroket, melampaui kenaikan upah minimum. Alhasil, warga Perancis berpenghasilan menengah di kota-kota besar harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk menyewa apartemen sebagai tempat tinggal mereka. Wilayah pemukiman pinggir kota (*banlieue*) pun tidak lepas dari setumpuk masalah. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu masalahnya. Permasalahan lainnya: kekurangan fasilitas transportasi dan layanan public (yang terjadi juga di desa-desa), tingginya angka kriminalitas, dan beberapa tahun belakangan, ekstremisme agama yang berkembang di sebagian kecil lingkungan imigran (Jusuf, Hasil Pemilu Perancis: Capres Uang vs Capres Rasis, 2017).

Pada awalnya kedatangan imigran di Perancis belum mendapatkan perhatian besar, sampai akhirnya terjadi kegagalan integrasi warga negara Perancis dengan para imigran tersebut. Pemerintah Perancis sendiri telah mengupayakan berbagai cara untuk menangani kehadiran para imigran, baik yang mengusahakan adanya integrasi maupun upaya untuk menekan jumlah imigran di Perancis.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Perancis, diskriminasi terhadap imigran kerap terjadi dikarenakan kekhawatiran warga negara Perancis terhadap imigran yang mereka anggap tidak berbaur dan berupaya untuk mendapatkan pengakuan. Terlebih lagi dengan adanya serangan teroris yang meningkatkan ketakutan terhadap orang asing semakin memperkeruh suasana di antara kedua pihak. Hal ini menjadikan kedatangan imigran menjadi sering kali diangkat oleh aktor politik dalam setiap kegiatan kampanye guna memperoleh dukungan dari warga negara Perancis yang memiliki pandangan serupa.

Isu imigran ini tetap saja mengalami politisasi dalam jangka waktu yang lama dan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan di negara lain di Eropa. Sistem politik Perancis membantu menjelaskan perhatian politik ini. Pertama, undang-undang pemilihan umum di Perancis telah mendorong fokus kepada imigrasi. Tidak seperti sistem partai multi-polar di negara-negara Benua Eropa lainnya, yang mendorong koalisi kompleks di berbagai bidang kebijakan, sistem pemilihan Perancis dimana *winner-take-all* telah menyebabkan pihak sayap kiri dan sayap kanan membesar-besarkan perbedaan partisan. Karena kebijakan makro-ekonomi dan industri tidak lagi menjadi pertanyaan politik yang memecah belah Perancis – terutama dengan pembalikan kebijakan 1983 terhadap Partai

Sosialis arahan Francois Mitterand – politik sayap kiri dan sayap kanan memanfaatkan isu-isu sosial baru seperti halnya imigrasi. Setelah kampanye pemilihan nasional berturut-turut (legislatif dan presiden) di mana setiap pemerintahan baru berupaya membatalkan undang-undang sebelumnya.

Perdebatan politik berkembang dari waktu ke waktu untuk mengikutsertakan peran imigrasi dalam isu-isu seperti identitas nasional, inkorporasi migran, keamanan dan terorisme. Mobilisasi kedua pasukan pro dan anti migran telah memberi asupan bara politik. Perancis adalah satu-satunya negara yang menyaksikan gerakan sosial imigran berskala besar.

Kontra-mobilisasi oleh ekstrimis sayap kanan juga memberi asupan debat politik tentang imigrasi. Hal ini telah mendorong politisi utama terkemuka untuk berhak menangani masalah imigrasi, agar dapat memenangkan kembali pemilih dari sayap yang paling kanan, atau menyebabkan partai-partai yang bersaing kehilangan suara karena partai Front Nasional.

Pada awal 1990-an, meskipun imigrasi di semua kategori integrasi hukum telah menurun, partai sayap kanan Front Nasional Jean-Marie Le Pen menarik sebagian besar pemilih dengan tuntutan demagogis untuk mengusir imigran muslim di Perancis. Politisi di seluruh spectrum politik menanggapi dengan argument mendukung '*immigration zero*', dan koalisi sayap kanan yang mulai berkuasa pada tahun 1993 mengartikan prinsip '*immigration zero*' ke dalam bentuk kebijakan.

Hukum Pasqua tahun 1993, yang dinamai seperti Menteri Dalam Negeri Perancis, Charles Pasqua, berusaha menghentikan arus imigran legal yang tersisa dengan berbagai cara; dengan melarang lulusan asing menerima tawaran pekerjaan dari pengusaha Perancis, dan menolak memberikan status tempat tinggal yang stabil, dengan meningkatkan masa tunggu bagi reunifikasi keluarga dari satu hingga dua tahun lebih lama, serta dengan menolak izin tinggal kepada pasangan imigran yang secara illegal telah tinggal di negara tersebut sebelum menikah.

Pada 17 Maret 2006, Pemerintah Prancis mencoba menerapkan *French Immigration and Integration Law*, yang bertujuan untuk memilih imigran yang pantas masuk ke wilayah Prancis. Hukum ini dikenal sebagai '*Sarkozy Law 2*' karena sebelumnya pada 26 November 2003 Pemerintah Prancis telah mencoba menggagas hal serupa dengan

tajuk *Immigration and Asylum* yang kemudian dikenal dengan '*Sarkozy Law*'. Ada tiga poin penting yang terdapat pada *French Immigration and Integration Law*, yaitu penyeleksian imigran (*immigration choisie*), kewajiban integrasi (*mandatory integration*), dan pembangunan (*co-development*) (Chou & Baygert, The 2006 French Immigration and Integration Law : Europeanisation or Nicolas Sarkozy's Presidential Keystone, 2007).

Hubungan imigran dan penduduk asli Perancis memang tidak berjalan dengan harmonis. Diskriminasi yang terjadi di kalangan imigran oleh penduduk asli Perancis merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran imigran di negara mereka, hal ini bahkan terjadi juga dalam skala pemerintahan. Dalam dinamika politik dan pemerintahan Perancis, terdapat dua sayap kepartaian yang bergantian menjadi *rulling party*. Keduanya merupakan partai dengan gerakan dan tokoh-tokoh pemikiran ekstrim. Penolakan terhadap integrasi dengan negara Eropa lainnya, secara langsung merupakan penolakan terhadap imigran yang akan maupun sudah masuk dan menetap di Perancis.

Permasalahan imigran ini membutuhkan sinergi dari pemerintah yang berwenang membuat kebijakan dan warga negara yang kooperatif, oleh karena itu imigran menjadi isu yang sangat disorot dalam kampanye Pemilu Presiden di Perancis pada tahun 2017, karena warga negara Perancis menantikan pemimpin yang mampu memberikan solusi dari permasalahan imigran ini. Terdapat dua kandidat Presiden Perancis yang sangat menyoroti isu ini, yaitu Emmanuel Macron dan Marine Le Pen.

Setelah melalui pergulatan panjang sejak 24 April hingga 8 Mei 2017, akhirnya pada putaran kedua pemilu, Prancis mendapatkan pemimpin baru. Ia adalah Emmanuel Macron, penggerak partai *En Marche!* (Bergerak!). Macron memenangkan perolehan suara dengan hasil cukup telak dari Marine Le Pen, kandidat dari Front National. Macron mendapatkan suara sebanyak 66,10%, sedangkan Le Pen mendapatkan suara 33,9%. Hasil ini tidaklah mengejutkan jika melihat pada jajak pendapat sebelumnya bahwa Macron diprediksi menang dengan suara lebih dari 60%.

Kemenangan Emmanuel Macron diklaim banyak pihak berhasil membuktikan praduga sebelumnya bahwa Prancis memang membutuhkan pemimpin yang membangun nilai-nilai Republik. Dengan slogan *liberte, egalite, fraternite* (kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan), Macron dianggap sebagian besar masyarakat Prancis mampu menegawantahkan nilai-nilai sebenarnya dari Prancis.

Jika dilihat lebih jauh, sejatinya kemenangan Emmanuel Macron bisa dicermati pada beberapa faktor. Pertama, faktor kebersamaan masyarakat Prancis dan dunia internasional untuk menolak Marine Le Pen sebagai pemimpin Prancis. Usai kemenangan Macron pada putaran pertama yang berlangsung pada 24 April, tim kampanyenya bergerak untuk mencari dan mencoba mendulang suara dari kandidat yang tersisih.

Francois Fillon dan Benoit Hamon berkomitmen tidak akan memberikan suara kepada Le Pen. Namun berbeda dengan Nicolas Dupont-Aignan yang melakukan tindakan sebaliknya. Tampaknya Macron berhasil mengendalikan situasi, kondisi serta pesonanya untuk mendulang suara dengan bantuan dari pendukung Fillon dan Hamon hingga memperoleh kemenangan mutlak.

Masyarakat Prancis lebih jeli dalam melihat situasi Pemilu Presiden kali ini jika dibandingkan pada tahun 2002. Mereka tidak ingin terjebak pada situasi yang telah dialami Inggris dan Amerika Serikat. Macron berusaha menjelaskan pengaruhnya bahwa tidak ada jalan bagi orang-orang rasis dan radikal untuk menguasai Prancis. Secara tidak langsung, Macron menunjuk kepada kedua pemimpin dunia, yaitu Theresa May dan Donald Trump.

Kedua, munculnya pemimpin muda dunia. Pasca Swedia dan Kanada, kini Macron menjadi bagian dari ketiga pemimpin muda dunia. Dilihat pada sejarah Prancis pun, mantan Menteri Urusan Keuangan, Digital, Media era Presiden Francois Hollande (periode 2012-2017) dinobatkan menjadi presiden termuda Prancis. Saat pemilihan telah selesai dilakukan, Macron menjadi presiden dengan usia masih 39 tahun.

Efek domino yang ditimbulkan dari ketiga negara tersebut tampaknya berhasil menginspirasi masyarakat Prancis untuk melakukan tindakan serupa. Kejenuhan dengan calon pemimpin tua, kebaruan pada pemimpin muda, semangat serta gairah pemimpin yang menyala membuat Macron dapat terpilih menjadi pemimpin Prancis. Hal tersebut seakan menjadi penanda bahwa partai-partai baru semacam *En Marche!* bisa juga menjadi pionir bagi kemunculan partai baru di belahan dunia lainnya (Wicaksono, 2017).

Dengan meraih kemenangan dalam Pemilu Presiden Perancis tahun 2017 ini, Emmanuel Macron mencetak sejarah sebagai Presiden Prancis termuda dalam sejarah Perancis. Dia berusia setahun lebih muda dari Louis Napoleon Bonaparte, tokoh revolusi Perancis saat menjabat Presiden Perancis pada tahun 1848. Dia disebut mendobrak sejarah tradisional Perancis karena beberapa hal.

Pertama, Macron menikahi mantan guru sekolah menengahnya. Istri Macron yang bernama Brigitte Trogneux (berusia 64 tahun) merupakan seorang janda dengan tiga anak sebelum dinikahi Macron. Kisah cinta Macron dan Trogneux menjadi pemberitaan besar media-media Perancis dan media asing selama proses perhelatan pemilu Presiden Perancis ini, dengan fokus pemberitaan pada perbedaan usia yang sangat jauh di antara keduanya. Macron jatuh cinta pada Trogneux saat masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku sekolah.

Selain karena kehidupan pribadi rumah tangganya, Macron juga dianggap mendobrak tradisi karena rekam jejak dan sosoknya yang sama sekali tidak diduga akan mengarah ke kursi kepresidenan Perancis. Tiga tahun sebelumnya, Macron sama sekali tidak dikenal publik. Ditambah, dia maju mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden tanpa dukungan dari partai politik besar Perancis sebagai kendaraan politiknya.

Banyak pihak yang memandang Macron terlalu muda dan kurang berpengalaman untuk menjadi Presiden Perancis. Para rivalnya menyerang rekam jejak kariernya sebagai bukti Macron bagian dari 'elite kapitalis global'. Sindiran dan kritikan menghujannya, terlebih karena dia dianggap mencampuradukkan sayap kiri dan sayap kanan.

Namun Macron berhasil merebut hati rakyat Perancis dengan meluncurkan pergerakan independen bernama 'En Marche!' yang baru berusia 12 bulan. Gerakan ini tidak beraliran sayap kiri maupun sayap kanan, hal yang langka dalam konstelasi perpolitikan Perancis.

Dia memanfaatkan citranya sebagai pemimpin muda yang dinamis untuk menarik ribuan relawan bergabung dengan 'En Marche!', yang modelnya sebagian mirip dengan gerakan akar rumput mantan Presiden Barack Obama pada pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2008 lalu (Christiastuti, Macron, Politikus Pemula yang Jadi Presiden Termuda Perancis, 2017). Dengan wadah 'En Marche!' yang artinya bergerak, dia mencontoh cara-cara kampanye Barack Obama. En Marche memiliki aktivis dan relawan yang secara *door to door* memperkenalkan figure Macron.

Saat melakukan kampanye Macron mencetuskan beberapa hal yang akan dilakukan saat terpilih menjadi Presiden Perancis dengan berkomitmen terhadap Perancis yang terbuka, serta berjanji mengedepankan inovasi dan reformasi ekonomi. Dia juga berjanji akan melindungi kelas pekerja. Pidato Macron juga menyatakan pendapatnya dan posisi

Perancis di tengah ketidakpastian global. Ia menyatakan akan tetap bersama dengan Uni Eropa dan mengedepankan kemitraan global yang strategis.

Dia berani mengungkapkan bahwa Perancis harus tetap memegang teguh nilai-nilai *Liberte, Egalite dan Fraternite* yang masing-masing memiliki arti kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Emmanuel Macron menunjukkan rasa simpati dan solidaritas terhadap warga pengungsi dan imigran. Dalam beragam kesempatan Ia akan menjamin komitmen Perancis untuk tetap berdampingan dengan Uni Eropa dan menjauhi praktik yang Ia sebut dapat mengancam kestabilan global.

Emmanuel Macron juga memiliki kepercayaan diri yang besar ini dibuktikan ketika Ia maju sebagai calon Presiden Perancis walaupun berasal dari partai yang masih muda, tidak memutuskan semangatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini merupakan sebuah hal yang sangat ekstrim, mengingat dia seorang politikus yang baru lahir dan langsung membentuk partainya sendiri yang dia berikan nama '*En Marche!*' yang memiliki arti 'Maju ke Depan!'.

Emmanuel Macron berhasil menyingkirkan partai arus utama dan menyingkirkan partai sayap kanan yang mengusung Islamophobia yang anti imigran dan ingin Perancis keluar dari Uni Eropa. Tentu saja ini sangat melegakan bagi warga negara Perancis dan bagi Uni Eropa setelah Macron yang berhasil menduduki kursi Presiden yang memiliki moto sejalan dengan keinginan warganya (Folia, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: "Bagaimana strategi yang digunakan oleh Emmanuel Macron dalam mengangkat isu imigran untuk memenangkan Pemilu Presiden Prancis 2017?"

C. Kerangka Teori

1. Teori Konstruktivisme

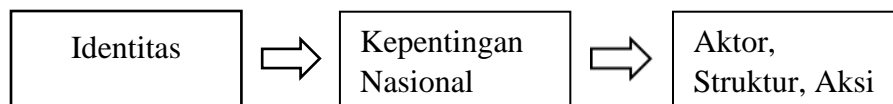
Konstruktivisme muncul menjadi salah satu teori dalam hubungan internasional setelah terjadi perdebatan antara teori-teori mainstream sebelumnya yaitu antara kutub rasionalis-positivis yang terdiri dari realism, liberalisme, melawan kutub reflektivis-pospositivis yang terdiri dari teori feminism, teori kritis, teori normatif, serta

teori-teori lainnya. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin. Teori ini lahir sebagai alternatif dari teori hubungan internasional sebelumnya yang dianggap belum mampu menjelaskan fenomena berakhirnya Perang Dingin dengan tepat. Pemikiran kunci konstruktivisme yaitu bahwa hubungan internasional merupakan suatu konstruksi manusia dan bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya (Jackson & Sorensen, 2016).

Peran konstruktivisme dinilai memberikan sumbangsih dalam mewarnai paradigma hubungan internasional. Seperti halnya tema yang dibawa oleh Alexander Wendt mengenai identitas. Konstruktivisme dinilai mampu membawa kembali aspek-aspek sosial, sejarah, dan norma dalam hubungan internasional. Konstruktivisme dapat menunjukkan tentang bagaimana norma internasional berkembang, pengaruh ide dan nilai yang dapat membentuk kebijakan suatu negara, dan pengaruh identitas terhadap aktor dan agensi politik.

Asumsi dasar Wendt menjelaskan identitas adalah landasan dasar perilaku aktor dalam hubungan internasional sebelum adanya kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional merupakan hasil daripada identitas itu sendiri. Negara akan menjunjung tinggi kepentingan nasionalnya ketika negara tersebut telah mengetahui mengenai apa yang harus dicapai oleh negara. Hal tersebut tergambar dalam bagan 1.1 di bawah ini (Wendt, 1992).

Bagan 1.1 Proses Pembentukan Kebijakan dalam Pendekatan Konstruktivisme
(Alexander Wendt)



Bagan tersebut menunjukkan bagaimana identitas lebih dulu membentuk kepentingan nasional suatu negara. Bagan tersebut juga menekankan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kaum neo-realis dan neo-liberal dengan konstruktivis. Pandangan neo-realis dan neo-liberal adalah bahwasanya kepentingan nasional merupakan tenaga penggerak dalam politik internasional yang melandasi aktor dalam bertindak. Tidak hanya kepentingan nasional, kaum neo-realis dan neo-liberal juga

menekankan adanya kekuasaan (*power*) sebagai landasan bertindak, baik kemampuan ekonomi maupun militer. Dapat digaris bawahi bahwa neo-realis dan neo-liberal lebih memperhatikan struktur material dalam membentuk realitas sosial dan mengesampingkan ide (struktur ideasional).

Struktur ideasional memegang peranan penting yang menuntun aktor dalam bertindak. Struktur ideasional dapat berupa ide, norma, nilai, agama/kepercayaan, sejarah, dan lain sebagainya. Struktur ideasional tersebut akan membentuk sebuah identitas yang digunakan oleh aktor dalam menentukan kepentingannya, kemudian melahirkan tindakan aktor dalam hubungan internasional. Dengan demikian, identitas menjadi faktor penjelas bagi aktor dalam menentukan perannya dalam urusan global.

Selain identitas dan kepentingan, elemen penting dalam konstruktivisme adalah aktor, struktur dan aksi. Keseluruhan elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pembentukan realitas sosial yang ada. Identitas suatu negara, kelompok masyarakat, maupun individu mempunyai ciri khas yang dapat membedakan satu sama lain. Dalam konteks negara, identitas biasanya merujuk pada serangkaian sejarah yang dimiliki negara pada masa lalu yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang dianut sebagai pedoman atau panduan dalam bersikap dan bertindak.

Sebagaimana masyarakat imigran memiliki sejarah panjang di Perancis. Keadaan tersebut membuat Perancis saat ini memiliki nilai-nilai yang telah terinternalisasi ke dalam masyarakat imigran. Aktor dalam pandangan konstruktivis pada dasarnya juga memiliki peranan dalam mengubah struktur yang membentuk kebijakan negara. Dalam hal ini Perancis memiliki sejarah berkembangnya masyarakat imigran.

Negara Perancis menggunakan struktur ideasional yaitu nilai-nilai *modele republicain d'integration* (Schnapper, 1991), sebagai pedoman dalam menentukan kepentingan Perancis sebagai tempat tujuan para imigran muslim. Kemudian setelah mengetahui identitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai *modele republican d'integration*, Perancis melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan identitas dan kepentingannya. Seperti mencipatakan perdamaian dan melindungi imigran muslim yang tertindas.

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pemerintahan Perancis baik domestic maupun luar negeri terus berkembang seiring bertumbuhnya populasi imigran muslim di Perancis. Arah Kebijakan domestik Perancis terhadap imigran muslim fokus dalam proses integrasi kaum muda dengan tiga aspek yaitu aspek pendidikan, aspek pekerjaan dan aspek kohesi sosial. Kebijakan luar negeri Perancis adalah pemerintah Perancis turut mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan aturan Uni Eropa dengan dipermudahkannya kependudukan bagi pencari suaka.

Model republican d'integration digunakan oleh Perancis untuk menentukan kepentingan nasionalnya sebagai negara demokratis yang ramah akan imigran yang kemudian dituangkan melalui kebijakan-kebijakan domestic dan luar negeri Perancis. Kepentingan tersebut mengantarkan Perancis pada peranan yang besar khususnya tanggung jawab untuk melindungi imigran yang disesuaikan dengan fenomena internasional saat ini. Merujuk kepentingan Perancis saat ini, Pemerintah Perancis merasa perlu mengatur imigran. Salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan luar negeri Perancis terhadap imigran dengan mengimplementasikan kebijakan '*French immigration and integration law*'.

2. Konsep Strategi Kampanye Politik

Kampanye ditinjau dari perspektif komunikasi politik memiliki banyak pengertian. Kotler dan Roberto (1989) mendefinisikan kampanye sebagai berikut: "Kampanye adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang bermaksud untuk membujuk pihak lain (target sasaran), untuk menerima, memodifikasi, atau meninggalkan ide, sikap, praktik dan perilaku tertentu". Unsur-unsur penting yang terkandung dalam pengertian ini meliputi kelompok yang disebut sebagai agen perubahan, lalu sasaran yang merupakan khalayak atau konsituen, yang diharapkan mampu menerima, memodifikasi ide, sikap dan perilaku tertentu (Cangara, 2009).

Tujuan kampanye akan bisa terlaksana apabila strategi kampanye yang digunakan tepat. Ada beberapa prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangan strategi kampanye, yakni *positioning*, *branding*, *segmenting*, strategi media, dan strategi non-media (forum-forum kampanye).

Positioning berkaitan dengan bagaimana seorang aktor atau politisi mampu mempengaruhi persepsi dan masuk dalam daftar puncak pemikiran konstituen. Ada daya jual yang khas dan tidak dimiliki oleh kompetitor lain yang pada akhirnya menjadi pilihan pertama bagi konstituen dalam kontestasi pemilihan umum. *Brand* sejatinya merupakan merek. Merek berkenaan dengan sesuatu yang melekat dalam dagangan yang menjadikannya berbeda dengan dagangan lainnya. *Branding* dalam konteks pemasaran politik, lebih merupakan upaya strategis mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar lebih mengenal produk politik. *Segmenting* berkaitan dengan sistem keteraturan sosial, yang tercermin dalam sistem nilai, norma, budaya, etika, moralitas, serta peraturan adat dan pemerintah. Dalam hal ini, partai politik harus mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat agar bisa memahami sifat dan karakteristik kelompok-kelompok tersebut untuk mempermudah ekspansi politik sesuai target.

Strategi media dalam memasarkan produk politik dimaksudkan sebagai strategi *marketing politik* yang diaplikasikan melalui media. Strategi marketing politik melalui media dapat dikategorikan dalam tiga saluran media, yaitu melalui media lini atas (*aboveline media*) seperti surat kabar, televisi dan majalah, media lini bawah (*belowline media*) seperti poster, spanduk, baliho, dan media baru (*new media*) yaitu melalui medium internet. Dan strategi non-media berkaitan dengan struktur komunikasi, seperti pertemuan informal, struktur sosial tradisional (adanya opinion leader atau tetua adat), saluran input (kelompok penekan), dan saluran output (legislative dan birokrasi) (Gasa, Strategi Kampanye Komunikator Politik, 2018).

Untuk memenangkan pemilihan presiden, Macron merekrut suara sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Macron berusaha menarik minat calon pemilih. Dengan wadah "*En Marche!*" yang artinya bergerak, memiliki aktivis dan relawan yang secara rumah ke rumah memperkenalkan figur Macron. Tak hanya membagi-bagikan selebaran, para relawan "*En Marche!*" juga melakukan wawancara dengan warga Prancis tentang hal yang mereka butuhkan dan inginkan dari pemerintah pada saat ini. Hasil-hasil wawancara itu lantas masuk basis data Macron untuk menentukan programnya pada saat kampanye tahun 2017.

Faktor lainnya, Macron pada saat berhadap-hadapan dengan Marine Le Pen dianggap memiliki pesan yang lebih positif dan ramah kepada setiap kalangan. Macron juga menempatkan diri bukan sekadar representasi elite sebagaimana yang diidentikkan Le Pen. Itu sebabnya Macron lantas dianggap lebih membumi dan berjiwa muda sekalipun dia berasal dari kalangan pebisnis.

Gaya kampanye Macron juga lebih kekinian dan santai dengan adanya musik-musik pop yang bisa menarik perhatian warga berbagai latar belakang. Sementara Le Pen dinilai terlalu serius dengan gaya kampanye yang tak berbeda dari calon-calon sebelumnya. Posisi Macron yang juga akhirnya menarik perhatian rakyatnya adalah keberanian untuk memilih posisi dan ide yang sama sekali bertolak belakang dengan Le Pen. Diketahui bahwa Le Pen adalah politikus partai sayap kanan yang konservatif dan tak menyukai integrasi Uni Eropa. Le Pen juga tak mendukung kebijakan terhadap imigran Prancis selama ini yang kebanyakan beragama Islam. Namun Macron tak ragu untuk mendukung Prancis tetap berada di Uni Eropa. Ia bakal menjadikan Prancis semakin globalis, artinya moderat dalam kebijakan politik internasional, termasuk tetap menerima imigran (Sihite, 2017).

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka teori tersebut, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa strategi yang dilakukan oleh Emmanuel Macron dengan mengangkat isu imigran untuk memenangkan pemilu presiden di Prancis tahun 2017 karena:

1. Kemampuan Emmanuel Macron dalam menyesuaikan antara gagasan utama yang dibawa dalam kampanye yang memang sesuai dengan keinginan warga Prancis sendiri, terutama terkait isu imigran, terorisme dan Pro Uni-Eropa.
2. Emmanuel Macron berhasil merebut hati rakyat Prancis dengan meluncurkan pergerakan independen bernama “En Marche!” yang baru berusia 12 bulan. Pergerakan itu tidak beraliran sayap kiri maupun sayap kanan, hal yang langka dalam perpolitikan Prancis.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif kualitatif maupun kuantitatif yaitu menjelaskan strategi kemenangan Emmanuel Macron mengangkat isu imigran dalam pemilu Presiden di Perancis tahun 2017. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari subyek, sedangkan penelitian kuantitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka. Penulis perlu menggabungkan kedua jenis penelitian ini dikarenakan diperlukannya data-data kualitatif maupun kuantitatif untuk menunjang dalam mendeskripsikan permasalahan yang ada, dan sebagai bukti kuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Data dan Jenis

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang diperlukan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk tidak langsung seperti dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, website dan sumber media yang dianggap resmi yang mendukung penelitian ini.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan strategi kemenangan Emmanuel Macron mengangkat isu imigran dalam Pemilu Presiden Prancis pada tahun 2017, penulis memberikan batasan waktu penelitian yaitu dimulai dengan kedatangan para imigran ke Perancis sejak Perang Dunia I (1914-1918) hingga Emmanuel Macron mendirikan gerakan politik independen, 'En Marche!', pada tanggal 6 April 2016 dan Emmanuel Macron terpilih menjadi Presiden Prancis pada pemilu Presiden selama dua putaran, tanggal 23 April dan 7 Mei 2017. Walaupun begitu data-data sebelum Macron maju sebagai kandidat Presiden hingga

sesudah terpilih dan dilantik sebagai Presiden Prancis tetap menjadi sumber data penelitian untuk melengkapi data primer yang ada.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan strategi mengangkat isu imigran yang digunakan oleh Emmanuel Macron dalam memenangkan pemilu presiden Prancis tahun 2017.
2. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis dan menyelesaikan jenjang Kesarjanaan Strata 1 (S-1), pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana pembahasan dalam masing-masing babnya akan dijelaskan dan dijabarkan ke dalam beberapa sub-sub bab. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai dinamika isu imigran dalam politik dan pemerintahan Prancis, dimulai dengan gambaran umum imigran Prancis yang terdiri dari Sejarah kedatangan imigran ke Prancis, kondisi demografi imigran di Prancis. Dijelaskan pula mengenai Sistem organisasi atau komunitas imigran di Prancis.

Bab III, membahas mengenai persaingan para kandidat presiden. Dalam bab ini akan dibahas mengenai program-program para kandidat presiden dan munculnya berbagai isu menjelang pemilu serta membahas pelaksanaan pemilu pada tanggal 23 April dan 17 Mei 2017 dan pencalonan Emmanuel Macron sebagai calon presiden Prancis oleh Partai “La République En Marche!”.

Bab IV, membahas mengenai strategi yang mempengaruhi kemenangan Emmanuel Macron dalam Pemilu Presiden Prancis Tahun 2017. Dalam bab ini akan banyak

membahas mengenai strategi mengangkat isu imigran yang digunakan Emmanuel Macron untuk memenangkan Pemilu Presiden Prancis tahun 2017.

Bab V, merupakan bab terakhir untuk menutup penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang rangkuman dari bab-bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.